Hudayana, B.2017. *Pemberdayaan Masyarakat Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). Jumlah halaman: viii + 235. ISBN : 978-602-229-699-7.

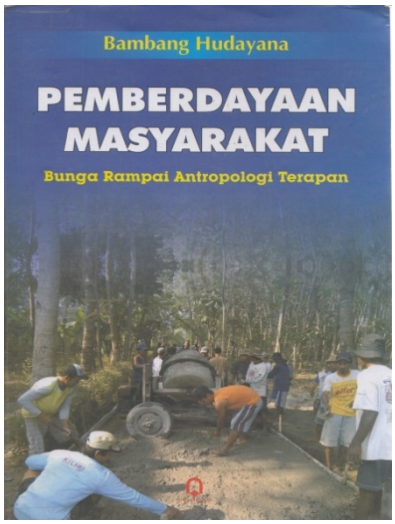

Buku ini merupakan Bunga Rampai Antropologi Terapan yang ditulis oleh pengarang berdasarkan latar belakangnya sebagai akademisi yang harus terlibat dalam penelitian dan agenda aksi, yaitu penelitian yang diabadikan untuk kegiatan advokasi dan pendampingan. Buku ini ditulis sebagai sajian penggambarkan mengenai bentuk keterlibatan antropologi terapan dalam berbagai program penguatan masyarakat sipil, HAM, perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya. Penulis berkesempatan bekerjasama dengan Organisasai Masyarakat Sipil (OMS) dan forum-forum yang dikelolanya dan menghasilkan makalah, kertas kerja, dan *policy paper* yang dibahas secara rinci di setiap bagian buku ini. Studi kasus yang dipaparkan antara lain mengenai pember-dayaan masyarakat oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Papua, pemerintah daerah dan perusahaan, beberapa industri pertambangan, dan forum-forum yang terlibat dalam mengembangkan program kemitraan tentang CSR dengan pembaruan desa.

Ilmu antropologi terapan berkontribusi terhadap pembangunan munculnya buku Bunga Rampai Antropologi Terapan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat (1984). Hal ini memberikan kepercayaan bagi para sarjana antropologi bahwa profesi mereka bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui analisis mendalam tentang berbagai fenomena sosial, seperti masalah urbanisasi, anak dan jender. Era reformasi mengubah berbagai pendekatan pembangunan, dari *top down* ke *bottom up*, dari teknokratis ke partisipatif, dan dari modal material ke modal material, dan dari pendekatan ke keadilan sosial, ternyata masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal karena munculnya kompleksitas permasalahan. Seperti konflik dan perebutan sumber daya di aras lokal, justru ketika masyarakat lokal memasuki dan hidup di era demokrasi dan globalisasi. Oleh karena itu, para sarjana antropologi melibatkan diri untuk memberikan solusi, yaitu memilih program aksi.

Program aksi adalah sebuah cara untuk terjun langsung ke dalam masyarakat dalam kerja advokasi agar mereka bisa lebih fokus dan berhasil dalam menjalankan agenda perubahan. Ketika terjun, mereka akan terlibat dan dilibatkan dalam berbagai program advokasi yang diangkat oleh berbagai OMS yang menggarap program di berbagai daerah atau menjalankan advokasi baru. Sehingga pada era reformasi tiba, banyak sarjana antropologi terapan yang bekerja untuk program OMS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lembaga/forum yang melakukan program aksi lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, para sarjana antropologi terapan, mereka bekerja membawa semangat untuk mengembangkan potensi dan budaya lokal dalam melakukan agenda advokasi dan pendampingan.

Kerja advokasi dan pendampingan merupakan bagian penting pada para sarjana antropologi terapan untuk menyimak adanya permasalahan sosial dan budaya yang menjadi belenggu dalam masyarakat. Sebaliknya pula, dapat menemukan potensi yang terdapat di dalam sebuah masyarakat dan kebudayaan lokal di dalamnya untuk melakukan perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari tulisan-tulisan kegiatan yang telah dilakukan, dapat berbuah menjadi *policy brief*, *policy paper*, *working paper* dan naskah akademik yang nantinya dapat dijadikan sumber referensi dalam membuat kebijakan yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Di dalam buku ini, bentuk dari kerja-kerja terapan membahas tentang pemberdayaan orang-orang Papua melalui kebijakan populis bagi kemajuan mereka. Program yang disesuaikan berdasarkan masalah dan potensi yang ada, menjadikan Papua lebih baik dengan pendekatan berbasis budaya lokal atas kebijakan yang diterapkan bagi mereka. Pada setiap akhir bagian dalam buku ini, pengarang menyimak berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat, untuk kemudian menawarkan solusinya.

Buku ini terdiri dari tujuh bagian, isinya terdiri dari 12 artikel yang berasal dari makalah penulis ketika melibatkan diri dalam program-program pembangunan pada era-reformasi. Artikel bahkan disusun untuk advoksi kebijakan, sehingga diniatkan untuk mendorong terjadinya perubahan berdasarkan masalah yang ditemui dan ditawarkannya solusi berdasarkan dari pengetahuan dan penerapan sudut pandang antropologi terapan.

Gerakan Kewargaan Secara Lokal

Bagian kedua ini, menceritakan tentang adanya potensi sosial dalam masyarakat untuk menggerakan pembangunan berbasis pada partisipasi warga. Era reformasi nyatanya telah membangkitkan OMS dan lembaga serta forum lainnya untuk bergerak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil dan posisi warga yang lebih mandiri. Terdiri dari dua artikel, yang membahas tentang "memperkuat perkumpulan rukun tetangga (RT) di Pulungsari Bantul" di mana peran RT ini pada era reformasi menjadi gerakan kewargaan untuk mewujudkan komunitas sejahtera (*welfare community*) daripada negara sejahtera (*welfare state*). Karena perannya begitu penting bagi kemandirian warga, RT menjadi arena konsentrasi ketika para *stakeholders* dari pemerintah, politisi, dan LSM masuk ke dalam sebuah masyarakat.

Pada masa orde baru, RT merupakan orang elite desa yang menjadi kaki tangan orang pemerintahan desa pada masanya. Akhirnya ia menjadi seorang figur yang bisa mengambil keputusan tanpa mendengarkan terlebih dahulu aspirasi warganya. Sebagaimana yang terjadi di Pulungsari Bantul, ketua RT menjadi kaki tangan untuk terpilihnya sebuah partai dan menggerakan warganya untuk memilih partai tersebut.

Pada masa era reformasi tiba, regenerasi ketua RT disemarakkan sehingga kaki-kaki tangan terputus dan aspirasi wargapun didengarkan dengan baik. Terbukti dengan adanya forum-forum warga ketika pemilihan ketua RT tiba mereka (warga) lebih memilih keluar dari korporatisasi, memperkuat kemandirian, dan berpartisipasi dalam penangan bencana. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah mempromosikan pentingnya pemerintah dan berbagai *stakeholders* memfasilitasi pengembangan RT yang merupakan struktur sosial paling kecil dalam sebuah masyarakat namun berpengaruh besar terhadap sebuah pengembangan masyarakat.

Penulis mengemukakan wacana tentang "keluar dari budaya kekerasan dalam dunia

transportasi" yang menyimak munculnya kesadaran kuat dari kalangan warga perkotaan untuk melawan arus kekerasan dalam bentuk kesemerawutan lalu lintas. Melalui gagasan ini penulis ingin membuktikan bahwa golongan minoritas, para relawan pro pejalan kaki dan tertib lalu lintas telah memperoleh simpati publik dalam melawan arus kekerasan jalanan ketika mereka menawarkan budaya berlalu lintas yang beradab dan membela kelompok pejalan kaki. Sistem transportasi modern seharusnya mampu menumbuhkan komunitas yang berbudaya tinggi.

Menggunakan paradigma budaya, pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan dengan memasang rambu-rambu lalu lintas, dan kode etik berlalu lintas. Namun perlu juga memasukan sistem sosial budaya supaya nilai, norma dan spirit kehidupan menjiwai perilaku para pengguna jalan. Reproduksi budaya halus dalam dunia transportasi dapat dihidupkan mulai dari ranah keluarga, sekolah dan masyarakat luas. Solusi ini bisa diterapkan melalui rekrutmen sopir angkutan umum untuk melayani masyarakat luas. Seorang sopir harus memenuhi kriteria memiliki budaya halus seperti tidak kebut-kebutan di jalanan, menampilkan karakter ramah, lembut, sopan, tidak agresif, sabar, dan kaya pengetahuan mengenai peta jalanan. Selain itu, jaringan transportasi berbasis kearifan lokal mesti dibuat, misalnya ada tempat istirahat sementara untuk pejalan kaki maupun sopir angkutan umum, dan ditempat tersebut mereka mendapatkan pelayanan yang nyaman, murah dan aman.

Pengembangan paradigma budaya harus dirintis perlahan melalui berbagai kajian dan penguatan institusi serta praksis budaya dalam dunia transportasi, terutama transportasi perkotaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekerasan, pelecehan, kesalahan penggunaan ruang publik yang rawan sekali terjadi di jalanan.

Penguatan Ekonomi Skala Kecil

Bagian ketiga buku ini menggambarkan masalah ekonomi Indonesia yang sebenarnya, yaitu umumnya masyarakat bergantung pada usaha skala kecil. Dua artikel menceritakan tentang penguatan ekonomi skala kecil, menangkap berbagai masalah riil yang populis sesuai dengan aspirasi gerakan para pelaku usaha skala kecil di lapangan. Pertama membahas tentang pedagang kaki lima (PKL): mengubah penertiban menjadi pemberdayaan". Bagian ini membahas masalah yang dihadapi oleh PKL yaitu penggusuran daripada pemberdayaan. Pada era orde baru, hal ini menunjukan betapa pentingnya mereka sebagai penunjang kebutuhan murah-meriah bagi masyarakat kelas bawah, juga menjadi ladang usaha dan mendapatkan pekerjaan yang relatif mudah. Namun, wacana ini tidak berjalan dengan lancar karena PKL identik dengan usaha informal yang mengganggu ketertiban yang disebabkan oleh lokasi mereka berada di trotoar dan pinggir jalan. PKL seringkali diamankan dengan cara digusur bahkan menimbulkan kekerasan yang memper-panjang tragedi tentang PKL. Satu sisi, PKL adalah warga negara dari lapisan bawah yang mencari nafkah dan sumber penghidupan dari berjualan. Bahkan PKL memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang signifikan jika dikelola dengan baik. Namun, di satu sisi PKL merupakan biangnya penyalahgunaan fasilitas publik yang diperuntukan untuk pejalan kaki.

Isu mengenai PKL bahkan muncul di perkotaan dengan istilah involusi perkotaan, di mana adanya pembagian kemiskinan karena terjadinya kompetisi antar sesama pedagang PKL yang jumlahnya semakin banyak di kota. Kebijakan yang diatur oleh Pemerintah daerah seperti pembatasan jumlah pelaku PKL, pengaturan izin usaha, harga sewa lokasi, relokasi tempat usaha, penggusuran dan program pemberdayaan, merupakan

solusi yang digagas oleh pemda untuk mengurangi polemik yang terjadi pada PKL. Sayangnya, pemda belum menyelesaikan masalah PKL baik jangka pendek maupun jangka panjang, kumpulan PKL semakin terorganisir untuk melakukan perlawanan ketika kebijakan tersebut belum juga diterapkan. Pemberdayaan PKL diarahkan agar usaha kaki lima semakin produktif secara partisipatif untuk meningkatkan semakin besarnya pendapatan untuk menghidupi sebuah keluarga.

Artikel kedua menyajikan tentang permasalahan kebijakan untuk penguatan UKM. Pentingnya pemberdayaan UKM ini berdasarkan banyaknya usaha skala kecil dan jumlah tenaga kerja yang begitu besar itu mengungkapkan bahwa masyarakat lapisan bawah telah bekerja keras untuk mencapai kemandirian dan keluar dari kemiskinan. Pemberdayaan skala kecil ini merupakan ujung tombak bagi Pemda, CSR, dan LSM untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat lapisan bawah. Pemberdayaan tersebut memerlukan program yang komprehensif, berkesinambungan dan dukungan anggaran yang besar menuju ekonomi kerakyatan. Penguatan usaha skala kecil diprioritaskan pada perlindungan usaha dalam bentuk aksi afirmatif yang menunjang prinsip kemandirian, keswadayaan dan partisipasi.

Pembaruan Desa

Bagian keempat, memaparkan tentang masalah pembangunan desa dan solusinya. Terdiri dari dua artikel yang masing-masing membahas "penguatan kepemimpinan berbasis kearifan lokal" dan "memanfaatkan undang-undang desa untuk memberdayaan masyarakat adat". Pertama, artikel membahas tentang ajakan terhadap para praktisi pembangunan desa dan para lurah serta pamong desa agar kearifan lokal direvitalisasi guna melahirkan pemimpin yang kredibel. Di dalamnya berisi nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat terutama tentang kepemimpinan yang ideal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat. Krisis kepemimpinan desa pada era orde baru dan reformasi, kendala dalam mewujudkan kepemimpinan berbasis kearifan lokal, membuat masyarakat segan terhadap pemimpin yang awalnya adalah ketua adat, tokoh agama, dan sebagainya. Namun pada era reformasi, kepemimpinan bersifat pragmatis dan dikuasai oleh kalangan elite.

Warga merindukan kepemimpinan berbasis lokal sehingga usaha mereka begitu keras untuk mewujudkan kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Dukungan warga terhadap agenda penguatan kearifan lokal membuat tumbuhnya strategi penguatan kearifan lokal untuk penemuan kembali kearifan lokal, mereproduksi kembali kearifan lokal, dan pelembagaan kearifan lokal. Untuk mewujudkan kepemimpinan desa bebasis kearifan lokal, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai pendekatan kultural dan struktural untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menggali, mereproduksi dan menjadikan acuan hidup sehari-hari. Serta pemerintah mendorong lahirnya kebijakan agar kearifan lokal menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

Artikel kedua, memaparkan masalah pembangunan desa selama ini yang belum menyentuh desa dan masyarakat adat. Gerakan masyarakat adat menuju kembalinya pemerintahan adat dilandasi oleh alasan yang bersifat historis-romantis, budaya politik identitas, dan tuntutan keadilan sosial. Hampir semua kelompok masyarakat adat gagal meraih kembalinya pemerintahan adat adalah mereka yang menghadapi ketidakberdayaan yang luar biasa. Hadirnya LSM tidak menjamin pula dapat diraihnya pemerintahan adat kembali. Berdasarkan refleksi dari berbagai bacaan, sulitnya meraih kembali

pemerintahan masyarakat adat dikarenakan organisasi masyarakat adat masih bersifat informal, para aktivis adat berhasil bangkit menghidupkan organisasninya, gagal melakukan konsolidasi untuk merumuskan strategi aksinya, perlunya memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, diperlukan juga keterampilan berdemokrasi, dan perlu dimilikinya kapasitas dalam mengelola konflik dan melakukan konsolidasi antarfaksi. Masyarakat adat layak diberdayakan dan mendapat hak tradisionalnya untuk menghidupkan kembali desa adat guna sesuai dengan hak tradisionalnya. Pemberdayaan ini perlu dukungan dari OMS yang terpercaya secara partisipatoris juga diperlukan kesungguhan pemda dan pemerintahan untuk mengakui dan memfasilitasi masyarakat adat dalam kembali menjadi desa adat beserta sumber daya alamnya yaitu tanah ulayat.

Papua Membangun

Bagian kelima, bercerita tentang "Papua membangun" beserta masalah-masalah di dalamnya. Pendekatan politik ternyata tidak berhasil dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Maka dua artikel dalam bagian ini menggunakan pendekatan budaya untuk menjawab permasalahan. Pertama, "pemberdayaan masyarakat Papua Barat berbasis kampung dalam agenda percepatan pembangunan" yang memperhatikan masalah kemanusiaan, keadilan dan kesesuaian dengan perkembangan budaya orang Papua. Masalah utama pada kasus ini adalah bias pembangunan di Papua seperti hilangnya pendampingan komunitas di era otonomi daerah, pelemahan organisasi masyarakat adat, penghancuran keraifan lokal dan sumber daya alam, dan kemerdekaan transformasi sosial-ekonomi di tengah penyelenggaraan Ostus dan bias pembangunan perkotaan. Tantangan ke depannya yang dijadikan solusi pula ke depannya yaitu pembangunan komunitas kampung secara partisipatif, penguatan ekonomi masyarakat berbasis pada kearifan lokal dan pengembangan masyarakat multikultural.

Kedua, "pembangunan Kabupaten Tambrauw berbasis pada kekuatan budaya" yang menyajikan tentang pentingnya penggunaan pendekatan budaya untuk pembangunan di Tambrauw. Potensi modal budaya dan modal sosial dalam percepatan pembangunan Papua menjadi suatu kebanggan bagi mereka orang Papua yang menjadi referensi hidup dan sumber daya yang ditingkatkan nilai tambahnya bagi kesejahteraan dan kehidupan berkelanjutan di tengah modernisasi. Masalahnya, mereka masih terjebak dalam budaya komunalisme yang memaksa mereka untuk bekerja di lingkungan komunal dan kerabat sehingga tidak bisa menjadi pekerja mandiri. Di sisi lain, modal sosial mereka sangat kuat dan bersifat solidaritas *in-group*, memperlihatkan solidaritas mekanik yang kuat ketika ada salah satu anggota keluarga menghadapi masalah dengan anggota suku di luar mereka. Namun sayangnya, modal sosial antar setiap suku belum tumbuh, hanya sebatas ikatan kewarganegaraan saja. Maka, hendaknya pembangunan di Tambrauw harus berdimensi kultural sehingga Otsus akan membawa kesejahteraan dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat kampung secara pastisipatif, mewujudkan kemandirian ekonomi warga berbasis kearifan lokal dan pengembangan masyarakat multikultural.

Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal

Bagian keenam, terdiri dari dua artikel yang membahas pentingnya kearifan lokal dalam kerja CSR, dan sekaligus pentingnya integrasi CSR dalam agenda desa membangun dan berbasis kearifan lokal. Pertama memperlihatkan kelebihan dari kearifan lokal untuk keberlanjutan dan

kedua pentingnya program CSR masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa.

Beberapa nilai penting dalam kearifan lokal misalnya tentang kepercayaan, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Kearifan lokal ini dipahami sebagai alat adaptasi masyarakat. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam hubungan solidaritas horizontal antar warga dan merupakan sikap spiritual. Kejujuran diterapkan dalam interaksi ekonomi pada proses pertukaran resiprositas (timbal-balik), saling menguntungkan dan permanen karena terjadi pada ikatan solidaritas mekanik. Para perumus kebijakan atau perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip yang berlaku dalam sebuah masyarakat adat. Fungsinya untuk menjamin kemakmuran dan jaminan sosial bersama, terutama jika sudah berbicara tentang sumber daya alam. Dengan berlakunya prinsip ini, perusahaan harus mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku dan dileburkan ke dalam agenda CSR.

Kedua, etika bisnis, CSR dan agenda desa harus sesuai dengan undang-undang desa 2014. Di mana posisi CSR dalam kerangka pembaruan desa semakin penting dan semakin jelas menghendaki bahwa CSR juga tidak bisa diselenggarakan tanpa koordinasi, integrasi dan sinergi dengan pembangunan. Selain itu, peran CSR pula sebagai katalisator pembaruan desa, agen penguatan pemerintahan desa, agen pembangunan desa berwawasan lingkungan dan sebagai *Rapid Response Program*. Penguatan kapasitas sangat penting dimiliki oleh desa agar bisa mengerti arti penting CSR dan memanfaatkan dana CSR secara akuntabel dan transparan serta mengalokasikan untuk program yang strategi demi mewujudkan kemandirian secara cepat.

Kearifan Lokal dan Pembangunan Risiko Bencana

Bagian ketujuh, mengangkat tema "kearifan lokal dan pengurangan risiko bencana pada bencana tektonik Yogyakarta 2006". Modal sosial menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mengangkat modal sosial dalam bentuk kearifan lokal orang Merapi dalam beradaptasi dengan lingkungan dan meningkatkan ketahan terhadap bencana alam erupsi gunung. Bukti bahwa modal sosial menajadi kekuatan pemulihan pasca erupsi Gunung Merapi ditunjukan oleh program LSM yang didukung oleh donor internasional. Programnya berupa merevitalisasi kerajinan batik di Desa Pulungsari Imogiri Bantul dengan menggunakan kekuatan modal sosial komunitas. Penggunaan modal sosial memiliki poin-poin penting dalam agenda penanggulangan becana. Di antaranya, modal sosial merupakan kekuatan komunitas dalam mewujudkan penanggulangan bencana secara partisipatif, perlu adanya pelestarian dan revitalisasi modal sosial di desa, penguatan modal sosial diperlukan agar program penanggulangan bencana tidak bias elite, penguatan modal sosial relevan untuk menjamin program rekonstruksi lebih berguna, dan penguatan diperlukan agar masyarakat sipil dan LSM semakin mahir dalam menyantuni para korban bencana Adaptasi orang merapi terhadap bencana terjalin atas dasar konsep harmoni, di mana orang jawa mengartikan konsep ini adalah nilai tertinggi dalam kehidupan sebagai orientasi kepribadian dan orientasi budaya. Harmoni juga sebagai instrumen adaptasi dalam perubahan lingkungan alaman sosial, mengedepankan prinsip *guyub* dan *rukun*. Kedua prinsip itu berfungsi untuk melakukan mitigasi, evakuasi dan rekonstruksi serta rehabilitasi yang mengangkat kemandirian masyarakat.

Refleksi

Buku ini bersifat ensiklopedik terutama bidang antropologi terapan yang tentunnya memiliki kekurangan dan kelebihan.

Kelebihan buku ini, pembaca mula-mula diberikan pengantar bagaimana muncul dan berkembangnya antropologi terapan disertai dengan perkembangan era pembangunan yang berbeda di setiap masanya. Pengantar ini memberikan bekal untuk memahami bagian selanjutnya yang lebih fokus menceritakan kasus-kasus pembangunan di Indonesia serta permasalahannya. Solusi yang ditawarkan lebih bersifat pengetahuan budaya masyarakat setempat. Dua belas artikel mengangkat tema tentang pemberdayaan masyarakat yang seringkali dijumpai pada masyarakat di sekitar kita. Buku ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan konsep-konsep dan solusi yang diberikan ketika permasalahan yang dihadapi sama persis atau mendekati, bisa meng-kompilasikan antar bagian atau saling melengkapi antar bagiannya. Kasus-kasus yang disajikan sangat beragam antara wilayah Papua (timur) dan Jawa (barat). Buku ini juga secara tidak langsung memuat penerapan tujuh teori yang digunakan oleh seorang *community development* dalam buku yang berjudul *An Introduction to Community Development* oleh Rhonda Phillips dan Robert H. Pittman dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam buku ini bahasanya santai dan tidak butuh pemahaman lebih untuk mengartikannya.

Buku ini memiliki kekurangan di mana terdapat beberapa kesalahan teknis, seperti kesalahan ketik di halaman tujuh paragraf dua, halaman 179 paragraf satu, dan di halaman lainnya. Lalu, tidak adanya glosarium untuk mengartikan istilah-istilah lokal masyarakat adat yang terdapat dalam artikel. Serta pada bagian pendahuluan banyak memuat dan berfokus pada bidang antropologi, sehingga pembaca dengan latar belakang non-antropologi akan kesulitan untuk memahami konteks bacaan, karena konsep-konsep yang digunakan berfokus pada ilmu antropologi terapan. Namun, kekurangan itu tertutupi dengan jelasnya keduabelas artikel tersebut yang menjadi refleksi dari konsep-konsep antropologi terapan sehingga pembaca dapat larut di dalamnya dan memahami kasus-kasus yang terjadi pada artikel yang dimuat, untuk bekal diri sendiri, pemahaman mendalam tentang pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat.

Mela Maulani

Program Studi Sarjana Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran – Jatinangor

mellamaulani18@gmail.com